

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Muhammadiyah, organisasi yang berdiri tahun 1912 M mempunyai hal krusial berbentuk pemikiran tentang pelayanan dakwah terhadap masyarakat dengan mengajak ke jalan yang benar dan maksimal. Saat berdiri, pertama kali mempunyai tujuan: “Menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumiputra di dalam Residensi Yogyakarta dan memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya”. Sebagai penyesuaian jaman, tahun 1914 terjadi perubahan yang kemudian tetap dicantumkan tahun 1921, 1934 dan 1941. Kembali terjadi perubahan, pada tahun 1943 yang kemudian berubah setelah negara ini merdeka, pada tahun 1946, 1950, 1959 1966 dan 1968, “maksud dan tujuan persyarikatan ini akan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”. Tahun 1985 berubah, dimana maksud dan tujuan persyarikatan ialah “menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah *Subhanahu wa Ta’ala*”. Terakhir pada tahun 2000, dimana maksud dan tujuan Muhammadiyah kembali seperti tahun 1985, “menegakkan

dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.<sup>1</sup>

Berdasarkan hal tersebut, ini menjadi sebuah pedoman klasik yang perlu tetap ada. Dalam tinjauan bahasa, dakwah yang berasal dari kata “*da'a*” ( دَعَا ) berarti “teriakan”, “panggilan” atau “undang-an”. Sedang berdasar bentuk kata kerja “*naa da*” ( نَادَى ) berarti “berteriak”, “memanggil/ mengundang”.<sup>2</sup> Pesan, materi, dan apa yang dibawa dalam kegiatan dakwah atau apapun meskipun baik. Apabila dalam cara menyampaikan, memberikan, dan melakukannya kurang atau tidak baik, maka hasilnya akan buruk atau tidak baik. Sebaliknya, sesuatu yang kurang baik apabila dikemas dan dibawakan dengan baik maka menghasilkan tanggapan dan hasil yang justru baik. Di sinilah pentingnya cara, metode, atau strategi dakwah dalam Muhammadiyah. Dakwah *bil-lisan* (perkataan, tulisan, media) maupun *bil-hal* (perbuatan, amaliah), sungguh memerlukan perbaikan atau pembaruan strategi seiring dengan masalah, tantangan dan perkembangan sasaran dakwah yang dihadapi. Peran dan keberadaan Muhammadiyah dalam melakukan suatu gerakan di abad kedua sebagai "*global civil society*" dalam arus "*global (good)*

---

<sup>1</sup> Haedar Nashir, “Muhammadiyah dan Pembentukan Masyarakat Islam”, mengutip data Mh. Djaldan (1998), 30 Juni 2008 diakses 14 Februari 2018 dari <https://rumahmedia.wordpress.com>, dan Zamah Sari, “Masyarakat Utama dalam Sejarah Gerakan Muhammadiyah”, merupakan kumpulan tulisan dalam buku “Menuju Peradaban Utama, Membedah Peran Muhammadiyah di Ruang Publik”, Al Wasat, Cetakan I, Desember 2011, hal 74-77

<sup>2</sup> Kamus Kontemporer Arab Indonesia, Diterbitkan Multi Karya Grafika, Ponpes Krapyak, Yogyakarta, hal 895

*governance*" mensyaratkan adanya pengembangan wilayah *tajdid* (pembaruan) dan *ijtihad* (kesungguhan) yang menjadi watak khususnya.

Dalam hal ini, Muhammadiyah sebagai bagian dari Islam memiliki cara khusus. Didukung banyak aset yang dimiliki. Dimana terbagi dalam 14 jenis amal usaha yang bisa diklasifikasikan pada beberapa bidang garap. Antara lain: bidang agama Islam, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, bidang politik kenegaraan, bidang ekonomi dan keuangan.<sup>3</sup> Kesemuanya merupakan layanan, meski kemudian menyesuaikan perkembangan jaman difokuskan pada MDMC (*Muhammadiyah Disaster Management Centre*), Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM).<sup>4</sup> Berbeda dengan cara pembangunan Barat yang cenderung individualis, kalangan Muslim cenderung menggali nilai-nilai filantropis, voluntarisme dan kasih sayang terhadap sesama umat.<sup>5</sup> Lebih jauh konsep filantropi (*Philanthropi: philos* berarti "cinta", dan *anthropos* berarti "manusia") adalah pendampingan yang bersifat pemberdayaan jangka panjang.<sup>6</sup> Dimana mampu menjawab permasalahan publik yang dialami masyarakat, sehingga program yang

---

<sup>3</sup> "Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah", disampaikan pada Mukhtamar ke-47 di Makassar , 3-7 Agustus 2015, hal. 23

<sup>4</sup> Hajriyanto Y. Thohari, "Trisula Baru Gerakan Muhammadiyah", Makalah kajian Ramadhan PWM Jawa Timur, 3-4 Juni 2017, Universitas Muhammadiyah Malang, diakses dari [www.umm.ac.id](http://www.umm.ac.id), 17 Februari 2018

<sup>5</sup> Hilman Latief, "Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal 109

<sup>6</sup> Ibid, hal 10

dijalankan berkelanjutan, bergerak di ranah makro, menyelesaikan problem di tingkat struktur dan mengubah sistem.

Perubahan geopolitik dan kekuatan ekonomi global beserta dampak negatif yang ditimbulkannya menjadikan Muhammadiyah harus kuat dan berani memasuki kerangka berpikir dan isu-isu strategis. Orientasi gerakan dakwah Muhammadiyah berubah, dari misi keagamaan ke kemanusiaan. Begitupun pemahaman filantropi dalam perspektif keagamaan. Tidak hanya bersinggungan dengan material namun juga memberikan waktu, uang dan pengetahuan.<sup>7</sup> Menurut Forum Global OECD tentang lingkungan, *“air, makanan dan energi merupakan hal penting yang berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia”*.<sup>8</sup> Dalam hal ini, pemerintah suatu negara sebagai aktor penting dunia yang mempunyai pengaruh tidak bisa lagi sendirian menangani persoalan besar tersebut. Sangat diperlukan komitmen dan kerja sama dengan berbagai aktor agar menjadi suatu keniscayaan, salah satunya adalah Muhammadiyah. Organisasi yang menyikapi secara bijak, salah satunya melalui tahapan dibawah naungan konstitusi.

---

<sup>7</sup> Ibid, hal 24

<sup>8</sup> Riccardini Fabiola, De Rosa Dalila, *“How the Nexus of Water/Food/Energy can be seen with the Perspective of People Well being and the Italian BES Framework”*, [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com), 2016, diakses 27 Maret 2018

Muktamar ke-47 di Makassar tanggal 3–7 Agustus 2015 disampaikan tiga belas Rekomendasi Muhammadiyah untuk isu-isu strategis keummatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal:<sup>9</sup>

1. Membangun masyarakat Ilmu.
2. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
3. Peningkatan daya saing umat Islam.
4. Penyatuan kalender Islam.
5. Melayani dan memberdayakan kelompok difabel dan kelompok rentan lainnya.
6. Pengendalian narkoba, psikotropika dan zat adiktif.
7. Tanggap dan tangguh menghadapi bencana.
8. Memaksimalkan bonus demografi.
9. Gerakan berjamaah lawan korupsi.
10. Jihad Konstitusi.
11. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
12. Pemanfaatan teknologi komunikasi.
13. *Human trafficking* dan perlindungan buruh migran.

Semua yang direkomendasikan tersebut merupakan bentuk “saran, usulan” kepada pihak lain, maupun apa yang akan dilaksanakan Muhammadiyah. Berdasarkan apa yang telah dilakukan sebelumnya,

---

<sup>9</sup> mdetik.com, “*Ini 13 Rekomendasi Muhammadiyah untuk Masalah Keumatan dan Kebangsaan*”, 7 Agustus 2015, diakses 27 Maret 2018

maka organisasi ini harus mendapat tekanan dari pemerintah negara asal investor yang masuk ke Indonesia. Diantaranya Perancis, Inggris dan Amerika Serikat.<sup>10</sup> Bahkan Muhammadiyah juga mengalami tekanan dari pemerintah RI sendiri. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 yang menyisihkan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai *judicial review* dalam Undang-Undang no.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.<sup>11</sup> Maka aktifitas ini merupakan bentuk perilaku mengkonsumsi budaya lain dan memproduksi hal yang baru. Tindakan ini berupa usulan tentang hal (kerangka) baru dan tantangan, namun

masih beresonansi dengan pemahaman budaya yang ada. Ini merupakan sebuah tindakan penyeimbangan yang rumit, terutama munculnya "kesalahpahaman" pada "kesalehan" masyarakat adat dan mengabaikan ketidaksetaraan yang diwariskan.<sup>12</sup>

Mengetengahkan hal ini menjadi lebih "luas", apabila kita bisa perhatikan apa yang terjadi di dunia. Ada dua poin di atas yang secara jelas membahas masalah kebencanaan dan persoalan lingkungan (poin ketujuh dan sebelas). Dimana keduanya menjadi titik tolak menjalankan

---

<sup>10</sup> info@diktilitbangmuhammadiyah.org, "Sukses Gugat UU Migas dan UU Air, Muhammadiyah diancam", 14 April 2015, diakses 27 Maret 2018

<sup>11</sup> www.suaramuhammadiyah.id,"Pernyataan Sikap PP Muhammadiyah Terkait Perppu Ormas", 8 Agustus 2017, diakses 27 Maret 2018

<sup>12</sup> Sidney Tarrow, "The New Transnational Activism", published in the United States of America by Cambridge University Press, New York, 2005, hal 61

langkah-langkah pengelolaan strategis terhadap akar masalah (*creative philanthropy*).<sup>13</sup> Seperti dalam peristiwa badai/ angin topan *Haiyan* yang terjadi di Philipina, sebuah negara di pesisir Samudera Pasifik. Selain sebagai destinasi wisata laut andalan di kawasan Asia Tenggara, tersimpan juga bahaya keadaan cuaca ekstrim, dari hujan es dan badai salju hingga pasir dan debu. Kekuatannya yang luar biasa bisa mencabut akar pohon yang besar dari tanah, mematahkan atap rumah bahkan mematahkan jembatan. Ditambah sambaran petir, banjir bandang dan angin yang sangat kencang.<sup>14</sup> Dalam masyarakat Philipina disebut sebagai *Badai Yolanda*, karena *Haiyan* merupakan bahasa China..

Kejadian yang dianggap paling mematikan, terakhir terjadi pada 7-8 November 2013. Sedikitnya ada 7.000 jiwa yang menjadi korban. Apabila dilihat dari proses terbentuknya, badai ini mulanya muncul di suatu kawasan bertekanan rendah di darat dekat Guinan (provinsi Samar). Satelit Aqua milik NASA mendapatkan gambar pada 8 November 2013 saat angin diperkirakan 270 km/jam (165 mph). Tanggal 8 November 2013 diberitakan *National Disaster Risk Reduction and Management Council* (Dewan Pengurangan Resiko dan Manajemen Bencana Nasional), ada empat orang meninggal dan tujuh cedera. Kota dan desa yang paling parah terkena dampak adalah Leyte dan Samar. Di sini

---

<sup>13</sup> Hilman Latief, op.cit, hal 26

<sup>14</sup> [www.ilmugeografi.com](http://www.ilmugeografi.com)

terputus transportasi dan komunikasi darat. Menjelang malam 9 November, korban tewas sekitar 138 jiwa. Dilaporkan satu juta warga berlindung di penampungan sementara. Badai Haiyan merupakan badai tropis ke-24 yang melanda pada tahun 2013 di negara ini.<sup>15</sup> *International Medical Corps* menyebutkan, “diperkirakan penduduk yang terkena dampak Haiyan mencapai 16,1 juta orang: 6.300 kehilangan nyawa, 1,1 juta rumah mengalami kerusakan atau kehancuran, 4,1 juta penduduk menjadi pengungsi, 5,9 juta kehilangan mata pencaharian dan sumber pendapatan.<sup>16</sup> Bencana badai menimbulkan rasa mencekam bagi masyarakat. Ingatan yang sulit hilang bagi mereka dalam menjalani hidup kemudian hari.

Kejadian ini disikapi oleh Muhammadiyah dengan pemberian bantuan melalui pengiriman tim relawan yang berangkat 18 November 2013, difasilitasi KBRI Manila yang diwakili *Minister Counselor* Sosial Budaya, Toto Waspodu. Tim ini bertugas hingga 1 Desember 2013, terdiri dari: dua dokter umum, satu dokter Spesialis Anestesi, satu anggota Komunikasi Darurat/ SAR, satu staf logistik/SAR, tiga perawat. Kehadiran Muhammadiyah di negara ini dengan wujud pembukaan layanan untuk Rumah Sakit Lapangan. Semua kebutuhan akomodasi tim ditanggung oleh wakil walikota Tuburan, sebagai bentuk respon terhadap

---

<sup>15</sup> [www.earthobservatory.nasa.gov](http://www.earthobservatory.nasa.gov), “*Super Typhoon Haiyan Surges Across the Philippines: Natural Hazards*”, diakses 28 Maret 2018

<sup>16</sup> [www.internationalmedicalcorps.org](http://www.internationalmedicalcorps.org), diakses 28 Maret 2018



bantuan Muhammadiyah dari Indonesia.<sup>17</sup> Pelayanan juga dilakukan di Ormoc, tempat terdekat dengan Tacloban, ibu kota Provinsi Leyte. Di tempat ini ditemukan hanya ada lima rumah sakit, yang bila di Indonesia dikategorikan rumah sakit tipe D. Sebagai bagian dari misi ini selama empat belas hari (18 November-1 Desember 2013) tim melayani tidak kurang 1.129 pasien ditambah layanan bedah tidak kurang dua belas kasus. Dalam catatan tim Muhammadiyah, bantuan internasional yang terlibat memberi bantuan *indefinite* (sangat lama), selain dari Indonesia adalah *MDM France Doctors for the World* dan *Israel Aid* di *Ipil Health District* dan *Barangay Ipil, Mercy Malaysia* di *City Heath Departement, Barangay Valencia* dan *Valencia Health District* serta *Canadian Medical Assistance Team (CMAT)* di *Ospa Hospital* dan *Barangay Nueva Sociedad*. Adanya daerah terisolir karena akses jalan tertimbun longsor, menjadikan waktu pendek sehingga hanya melayani 120 pasien. Ini merupakan tim kesehatan pertama yang hadir di perbukitan sebelah Barat Ormoc City. Ditambah mahalnya biaya berobat, saat ditemukan sepuluh pasien yang memerlukan rujukan ke rumah sakit, tujuh diantaranya menolak karena alasan biaya. Informasi ini menunjukkan betapa besar dampak *Haiyan*. Muhammadiyah sendiri telah memberikan bantuan senilai 200 juta rupiah dalam bentuk pengiriman tim kesehatan dan obat-

---

<sup>17</sup> [www.sangpencerah.id](http://www.sangpencerah.id), “*Relawan Muhammadiyah Bergerak ke Wilayah Terparah di Filipina*”, 26 November 2013 diakses 28 Maret 2018

obatan. Pemberian bantuan ini dikoordinir oleh MDMC dengan dukungan RS Muhammadiyah dan LAZISMU.<sup>18</sup>

Berikutnya adalah Nepal. Keberadaannya di lingkaran pegunungan aktif antara lempeng tektonik India dan Tibet menjadikan negara ini sangat rawan terkena gempa bumi. Terakhir adalah gempa dengan 7,9 skala *richter* (SR) yang menimpa mereka pada tanggal 25 April 2015 jam 11.20 waktu setempat, dengan korban ribuan orang. Berdasar informasi, satu bulan setelah peristiwa, sekitar 70.000 anak balita membutuhkan bantuan mendesak perbaikan kondizi gizi mereka yang semakin menurun. Sekitar 15.000 anak sangat membutuhkan makanan terapeutik untuk merawat permasalahan gizi yang sangat parah. Sekitar 55.000 anak dengan masalah kurang gizi membutuhkan makanan suplemen dan perawatan untuk memperbaiki kondisi kesehatan mereka. Padahal, sebelum bencana ini terjadi telah ada lebih dari 10 persen anak Nepal mengalami masalah kurang gizi dan hampir 40 persen perkembangannya terhambat akibat permasalahan gizi.

Muhammadiyah *Aid* yang menjadi sumbangsih organisasi ini di luar negeri kembali dilaksanakan 29 April 2015. Dua dokter spesialis dan satu perawat RS Muhammadiyah menjadi bagian dari delegasi Republik Indonesia untuk bantuan kemanusiaan korban Gempa Bumi di Nepal.

---

<sup>18</sup> m.republika.co.id, “Indonesia Perlu Dirikan Rumah Sakit Lapangan Untuk Korban Topan Haiyan”, 3 Desember 2013

Dikoordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bersama Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), *Disaster Management Center/DMC* (Dompet Dhua'afa), PKPU dan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Muhammadiyah *Aid* sendiri menjadi tim yang menyiapkan tenda, logistik, selimut, kantong mayat, makanan pengganti ASI, perlengkapan wanita, bayi dan lansia sebagai bagian perlengkapan rumah sakit bedah lapangan. Keberangkatan mereka semua difasilitasi oleh Maskapai AirAsia yang membuka penerbangan gratis sebagai langkah partisipasi.<sup>19</sup> Kehadiran di negara ini dikoordinasikan dengan lembaga internasional terkait pendirian RS Darurat. Mereka beroperasi melayani warga Satungal pukul 08.30 s.d 17.00 waktu Nepal, diutamakan yang menderita patah tulang. Konsentrasi bantuan Indonesia ini juga dipusatkan di RS Kantipur.<sup>20</sup> Tanggal 1 Mei 2015 tim kedua yang berangkat dengan membawa bantuan selimut senilai 60 juta rupiah sebagai hasil pengumpulan oleh LAZISMU.<sup>21</sup> Mengingat banyaknya pengungsi yang tinggal di pemukiman darurat bersuhu sekitar 5 derajat Celcius. Ini merupakan hasil koordinasi intensif antara MDMC dengan BNPB serta Kementerian Kesehatan dan HFI.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> m.detik.com, "*Sejumlah Organisasi Sosial Indonesia Kirim Bantuan Ke Nepal*", 29 April 2015

<sup>20</sup> news.analisadaily, "*RS Darurat Indonesia Mulai Layani Ribuan Warga Satungal Nepal Korban Gempa*", 6 Mei 2015

<sup>21</sup> www.muhammadiyah.or.id, "*Selimut Bantuan LAZISMU Telah Diterbangkan Ke Nepal*", 2 Mei 2015

<sup>22</sup> www.muhammadiyah.or.id, "*Turut Dalam Delegasi Indonesia, Dua Dokter Muhammadiyah Berangkat Ke Nepal*", 29 April 2015

Sebuah sikap menghadapi hal di atas, pemikiran yang ada dicantumkan. 19-22 Mei 2015 diselenggarakan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX di Yogyakarta. Musyawarah yang menghasilkan pemikiran tentang “bencana” sebagai suatu peristiwa, berkaitan dengan manusia yang menjadi korban secara alamiah maupun non-alamiah. Dengan basis keimanan dan ilmu pengetahuan. Ini menjadi salah satu metode untuk memenuhi keinginan “aktor” asing pada pemikiran Islam Indonesia. Pencantuman dilakukan dalam bentuk buku berjudul “Fikih Kebencanaan”. Di kantor PP Muhammadiyah Jakarta, 1 Juli 2015 diluncurkan buku tersebut, yang berisi tentang panduan keagamaan soal bencana. Didalamnya dijelaskan tentang istilah, pencegahan maupun penanggulangan. Selanjutnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul “*Coping with Disaster: Principle Guidance from an Islamic Perspective*”. Sebagai langkah sosialisasi terhadap masyarakat dunia mengenai sudut pandang Muhammadiyah dalam memaknai dan menyikapi kebencanaan. Ini menjadi sarana bagus berkomunikasi dalam penentuan dakwah internasional yang dijalankan. Menghadapi jamaah berbeda budaya, adat dan latar belakang, termasuk pemerintah yang bertugas menyiapkan kebijakan suatu negara.

Buku ini menjadi panduan dalam rangka ikut membantu mengatasi masalah “sosial” masyarakat. Penjelasan tentang kepemilikan potensi dan

resiko negara kita berdasar letak geografis yang strategis. Ditambah kompleksitas segi demografis (kepadatan penduduk) dan segi ekonomis (kemiskinan yang masih tinggi).<sup>23</sup> Buku ini menjadi pemberi informasi baru selain buku sebelumnya yaitu *Disaster Diplomacy*. Kalimat “abad kedua” bagi Muhammadiyah yang selama ini menjadi amunisi terasa menjadi lebih lengkap. Muhammadiyah Indonesia menjadi bahasan penting akibat tindakan di wilayah negara maupun melewati batas negara. Pendekatan dakwah dengan strategi baru yang sebenarnya telah lama dilaksanakan. Keimanan dan ilmu pengetahuan merupakan dua dasar untuk menampilkan agama yang dianut. Tentu ini merujuk pada masa lalu (klasik) saat ilmu pengetahuan mulai dijadikan “raja” waktu Indonesia dalam cengkeraman Belanda. Ini sebenarnya bertujuan untuk mengurangi pengaruh besar yang selama ini diyakini oleh masyarakat Indonesia sejak masuknya Islam pertama kali di Nusantara.

Secara khusus, tulisan ini mengerucut pada peristiwa yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Suatu fakta kehidupan yang tak dapat diingkari karena kemunculan tak terduga, tiba-tiba dan menimbulkan kerusakan serta dampak negatif lainnya. Dijelaskan, bukan hanya permasalahan yang dikonotasikan sebagai kehendak pencipta alam

---

<sup>23</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “*Fikih Kebencanaan*”, hal 1

semesta, tetapi juga sebagai akibat perilaku manusia. Kesemuanya diistilahkan sebagai “bencana”.<sup>24</sup>

#### Tujuan Riset

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui agenda strategis dan langkah-langkah yang akan dan sudah dilaksanakan oleh Muhammadiyah dalam percaturan internasional sesuai dengan spesialisasi perannya, dalam hal ini dakwah. Dakwah dalam hal ini bersifat spesifik berupa kemanusiaan, melengkapi peran yang selama ini dijalankan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **B. Kontribusi Riset**

Tulisan ini diharapkan:

1. Berdasar perspektif teori, dapat menjelaskan kontribusi nyata organisasi non-pemerintah, dalam hal ini saat Muhammadiyah menjalankan aktifitas sosialnya berkaitan dengan hubungan luar negeri.
2. Berdasar perspektif praktek, setidaknya secara internal dapat digunakan sebagai referensi bagi jajaran individu di berbagai level Muhammadiyah untuk bisa berkontribusi lebih baik lagi. Bagi kalangan eksternal, bisa menjadi *role model* sebuah organisasi non-pemerintah yang mampu mengisi peran sebagai “pendamping”

---

<sup>24</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “*Fikih Kebencanaan*”, hal 9-11

- pemerintah dan menaikkan posisi tawar dalam lingkup komunikasi nasional maupun internasional.
3. Berdasar perspektif kebijakan, bisa digunakan sebagai referensi para *decision maker* dalam struktural Muhammadiyah. Adapun bagi kalangan eksternal, bisa juga menjadi bahan pembandingan dalam menentukan dan merumuskan sebuah kebijakan regional maupun internasional bidang kemanusiaan.

### **C. Rumusan Masalah**

Merujuk pada tulisan latar belakang masalah, “lahir” sebuah pertanyaan mendasar:

**Bagaimana bantuan Muhammadiyah (tanpa meninggalkan aktifitas dakwah) dalam menangani bencana kemanusiaan yang dialami Rohingya di Rakhine?**

### **D. Studi Pustaka**

Dalam penyusunan tulisan ini, penulis berusaha menelusuri pustaka/ literatur yang berkaitan dengan posisi sebagai *Non-Government Organization* (NGO) dan aktifitas dakwah bidang kemanusiaan Muhammadiyah secara relevan. Dakwah yang dilakukan beriringan dengan perubahan jaman, sehingga manifestasi gerakan bertransformasi. Mengenai Hubungan Internasional, perkembangannya memunculkan banyak aktor baru di dalamnya. Peter Willetts (seorang guru besar dari

London, Inggris) menulis tentang “*What is a Non-Governmental Organization?*” Dalam tulisannya ini, disebutkan tentang istilah, "organisasi non-pemerintah" atau NGO yang muncul tahun 1945 dikarenakan dalam PBB perlu dibedakan antara keterlibatan badan khusus pemerintah dan organisasi swasta internasional. Hampir semua jenis badan swasta dikategorikan sebagai organisasi non-pemerintah. Kedudukan mereka independen; tidak terlihat menentang pemerintah sebagai partai politik; tidak mencari keuntungan; dan tidak melakukan tindakan kriminal. Bahkan lebih fokus pada persoalan hak asasi manusia.

Berdasar sejarah sebelum terbentuknya PBB, pada tahun 1910 ada 132 LSM telah bergabung *Union of International Associations*. Masa itu, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) secara resmi memosisikan penghubungnya dengan organisasi-organisasi swasta. Mereka waktu itu menyebut diri sebagai lembaga internasional, perserikatan internasional atau hanya organisasi internasional. Mereka menjadi “organ” penting dalam bidang ekonomi dan sosial. Berdasar pasal 70 dan 71, dimana mereka bisa berpartisipasi untuk ikut memberi pertimbangan suatu persoalan sesuai keahlian atau latar belakang mereka didirikan. Sebuah NGO didefinisikan sebagai perkumpulan sukarelawan independen yang bertindak bersama-sama secara berkelanjutan dan untuk tujuan bersama. Melalui hal ini, Peter Willetts menguraikannya sebagai: NGO, Kelompok Kepentingan,



Kelompok Penekan, Organisasi Sukarela Swasta dan Lobi; Aktor Transnasional; NGO dan Independensi Mereka dari Pemerintah; NGO, Partai Politik, dan Etnis Minoritas; NGO dan Hubungannya dengan Bisnis dan Perdagangan; serta NGO dan Penggunaan Politik Kekerasan.

Selanjutnya apabila kita mengamati peran organisasi non-pemerintah, pada umumnya mereka berhubungan dengan kepentingan dasar umat manusia yang terkait masalah antara lain perdamaian, lingkungan, dan sebagainya. Bisa dikatakan keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari Hubungan Internasional pada jaman modern. Strukturnya sangat bervariasi, bisa menjadi hierarki global dengan otoritas pusat yang relatif kuat atau pengaturan federal yang lebih longgar. Bisa juga mereka mungkin berbasis di satu negara dan beroperasi secara lintas nasional. Ini seiring tumbuhnya lalu lintas ekonomi dan kepentingan antar negara. Jaman sekarang bisa dikatakan negara-negara di dunia sudah tidak mampu lagi mengimbangi apalagi melawan pengaruh NGO terkait permasalahan yang menjadi isu global “sensitif” tersebut. Ini mungkin menjadi sesuatu hal yang sangat mengejutkan dengan diperolehnya informasi bahwa sekarang telah ada literatur tentang kerja politik, jaringan dan koalisi NGO transnasional. Serta pentingnya NGO sebagai bagian dari penjelasan proses politik di berbagai negara.

David Potter dan Annie Taylor dalam pendahuluan buku “*NGOs and Environmental Policies: Asia and Africa*” menyebutkan, mungkin ada yang tidak setuju sepenuhnya bahwa kita berada di tengah-tengah "revolusi asosiasi" global yang mungkin terbukti sama pentingnya dengan abad kedua puluh yang lalu. (“*It therefore may come as something of a surprise to learn that there is now a growing literature on the political work of NGOs, including transnational NGOs networks and coalitions, and on the significance of NGOs in explaining political processes in different countries. One may not agree entirely with Salamon (1994:109) that ‘we are in the midst of a global “associational revolution” that may prove to be as significant to the latter twentieth century ...’.*”). Konsep NGO yang digunakan di sini menunjuk secara kasar kepada organisasi non-pemerintah dan nirlaba. Sebagai sebuah organisasi, mereka memiliki staf (lebih dari satu) yang bekerja penuh waktu. Ini menjadi semacam hierarki, tercatatnya secara rinci anggaran dan tempat secara fisiknya (kantor).<sup>25</sup>

Perbedaan antara NGO dan pemerintah tidak selalu mudah dilakukan. Keberadaan beberapa NGO yang dibiayai hampir secara eksklusif oleh suatu pemerintah memunculkan kekhawatiran, apakah ini membuat mereka menjadi kepanjangan tangan negara? Atau

---

<sup>25</sup> David Potter (ed), “*NGOs and Environmental Policies: Asia and Africa*”, FRANK CASS LONDON • PORTLAND, OR, hal 1

kebalikannya. Aspek nirlaba yang dimiliki juga dapat menimbulkan masalah. Misalnya adalah organisasi riset lingkungan non-pemerintah yang disponsori sepenuhnya oleh perusahaan swasta. Tujuan untuk pencarian keuntungan bisa menjadi hal utama. Disinilah perbedaan hukum timbul. Di kebanyakan negara, organisasi harus terdaftar, dan karena itu secara formal bisa diklasifikasikan sebagai usaha mencari laba atau tidak<sup>26</sup>.

Dalam aktifitas mereka, salah satu yang bisa menjadi sarana adalah GNDR (*Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction/ Jaringan Global Organisasi Masyarakat Sipil untuk Pengurangan Resiko Bencana*). Sebuah jaringan desentralisasi regional yang mendefinisikan dirinya sebagai organisasi internasional yang berkomitmen untuk bekerja sama dalam memperbaiki kehidupan manusia yang terkena dampak bencana di seluruh dunia (“...*is the largest international network of organisations committed to working together to improve the lives off people affected by disasters world wide*”). Dengan ketersebarannya di dunia lebih dari 129 negara (berpenduduk menengah, berpenghasilan rendah) dan anggota lebih dari 800 organisasi. Pusat koordinasinya ada di London. Disini digalakkan visi ketangguhan bagi manusia yang rentan, berupa persiapan diri untuk mengurangi,

---

<sup>26</sup> Ibid, hal 2

memulihkan dan beradaptasi dengan bahaya dan iklim yang terus berubah.<sup>27</sup>

Ini merupakan hasil peninjauan kembali pada sebuah program PBB sebelumnya. Pada tanggal 11 Desember 1987 di sesi kedua, Majelis Umum PBB menetapkan tahun 1990-an sebagai “Dekade Internasional untuk Pengurangan Bencana Alam (*International Decade for Natural Disaster Reduction/ IDNDR*). Suatu gagasan dasar berupa konsep program internasional dibalik penetapan dan tingkat kerugian yang dirasa berat serta terus meningkat. Disisi lain, didapatkan begitu banyak pengetahuan ilmiah dan teknik yang bisa digunakan secara efektif untuk mengurangi kerugian akibat bencana.<sup>28</sup>

Mengacu juga pada tulisan, “*Cerita tentang Kiyai Haji Ahmad Dahlan Catatan Haji Muhammad Syoedja*”. Dalam tulisan ini, dakwah awal Muhammadiyah melalui pembagian (spesifikasi), diantaranya bahagian Penolong Kesengsaraan Oemoem yang diketuai oleh H.M. Syoedja’. Dimana saat berlangsung Rapat Anggota Muhammadiyah Istimewa (17 malam 18 Juni 1920) dihadiri oleh lebih kurang 200 anggota dan simpatisan yang diundang. H.M. Syoedja’ menyebutkan, bahwa dalam pelaksanaan pertolongan kepada masyarakat yang menderita sakit, dengan membangun *hospital*. Berikutnya *Armhuis*, yang

---

<sup>27</sup> www.unisdr.org, “Who Are GNDR”

<sup>28</sup> www.fire.uni-freiburg.de, “International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR)2”

berarti rumah miskin, setelah itu membangun *Weeshuis*, artinya rumah yatim.<sup>29</sup>

Tulisan ini juga merujuk pada pemikiran Zakiyuddin Baidhaw, “*SATU ABAD MUHAMMADIYAH, Pergeseran Paradigma Dakwah*”. Dalam tulisan ini, disebutkan langkah yang dijalani Muhammadiyah bisa dianggap “tepat” dalam menyikapi abad kedua yang mulai dimasuki. Diingatkan tentang “prediksi” Rasulullah, bahwa dalam seratus tahun akan muncul mujadid baru yang gigih memperbarui agamanya (*man yujaddidu laha dinaha*). Inilah dimana etos keilmuan Islam menjadi penyeimbang Islamisasi ilmu pengetahuan.<sup>30</sup> Inilah kenyataan yang terjadi, bahwa aktifitas dakwah modern memiliki panduan berupa buku “Fikih Kebencanaan”. Ini menjadi materi utama penulisan tugas akhir ini.

## **E. Kerangka Teoritik**

Dalam membahas karya ini, penulis menggunakan teori *Faith Based Organization* dan *Faith Based Humanitarian* yang merupakan pemikiran intelektual:

1. Gerard Clarke dari Pusat Studi Pembangunan, University of Wales, Swansea, menjelaskan tentang tipologi organisasi berbasis agama dalam konteks pembangunan internasional. Ini merupakan bagian penting dalam menetapkan dasar perbandingan organisasi lintas

---

<sup>29</sup> “*Cerita Tentang Kiyai Haji Ahmad Dahlan, Catatan Haji Muhammad Syoedja*”, hal 100-101

<sup>30</sup> Zakiyuddin Baidhaw, “*SATU ABAD MUHAMMADIYAH, Pergeseran Paradigma Dakwah*”, e-repository.perpus.iainsalatiga .ac.id, 15 September 2016

agama dan geografis (*The typology of faith-based organisations in the context of international development. This is part ..... a basis for comparison of these organisations across religious and geographical boundaries*):

- a. Organisasi perwakilan berbasis agama atau lembaga pusat yang mengatur masalah-masalah doktrin, memimpin umat beriman dan mewakili mereka melalui keterlibatan dengan negara dan aktor-aktor lain. (*Faith-based representative organisations or apex bodies which rule on doctrinal matters, govern the faithful and represent them through engagement with the state and other actors*).
- b. Organisasi amal atau pengembangan berbasis iman yang memobilisasi umat beriman untuk membantu masyarakat miskin dan lainnya, dan yang mendanai atau mengelola program yang menangani kemiskinan dan pengucilan sosial. (*Faith-based charitable or development organisations which mobilize the faithful in support of the poor and other social groups, and which fund or manage programmes which tackle poverty and social exclusion*).
- c. Organisasi sosial-politik berbasis iman yang menafsirkan dan menyebarkan kepercayaan sebagai sebuah konstruksi politik,

mengorganisir dan memobilisasi kelompok-kelompok sosial berbasis identitas keimanan tetapi dalam mengejar tujuan tujuan politik yang lebih luas atau, alternatifnya, mempromosikan kepercayaan sebagai konstruksi sosial budaya, sebagai sarana menyatukan kelompok-kelompok sosial yang berbeda atas dasar identitas budaya yang berbasis agama. (*Faith-based socio-political organisations which interpret and deploy faith as a political construct, organising and mobilising social groups on the basis of faith identities but in pursuit of broader political objectives or, alternatively, promote faith as a sociocultural construct, as a means of uniting disparate social groups on the basis of faithbased cultural identities*).

- d. Organisasi missionaris berbasis agama yang menyebarkan pesan-pesan berupa kunci keimanan (di luar penganut agamanya), secara aktif mempromosikan masalah keimanan dan mencari orang-orang yang bertaubat untuk itu, atau dengan mendukung dan terlibat bersama komunitas agama lain berdasar prinsip kunci keimanan. (*Faith-based missionary organisations which spread key faith messages beyond the faithful, by actively promoting the faith and seeking converts to it, or by supporting and engaging with other faith communities on the basis of key faith principles*).

- e. Organisasi radikal, illegal, atau teroris yang berbasis agama mempromosikan bentuk identitas keimanan yang radikal atau militan, terlibat dalam praktek-praktek illegal atas dasar kepercayaan atau terlibat dalam perjuangan bersenjata atau tindakan kekerasan yang dibenarkan atas dasar keimanan. (*Faith-based radical, illegal or terrorist organisations which promote radical or militant forms of faith identity, engage in illegal practices on the basis of faith beliefs or engage in armed struggle or violent acts justified on the grounds of faith*).<sup>31</sup>
2. Dr. Hossam Said,<sup>32</sup> yang menyebutkan bahwa berdasarkan sejarah masa awal Islam, pemerintah Islam yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme “*Bait-ul-Maal*” (*the House of Treasury*) yang merupakan dana kolektif untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Islam juga membuka pintu untuk sedekah lain yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Inilah penjelasan luas mengenai sasaran wakaf, sekolah dan rumah sakit Islam.

---

<sup>31</sup> Jonathan Benthall, “Introduction: Faith-based Organisations as Political, Humanitarian or Religious Actors”, *Proceedings of the Workshop Religion, Politics, Conflict and Humanitarian Action Faith-Based Organisations as Political, Humanitarian or Religious Actors, Switzerland, The Graduate Institute of International Studies, Geneva May 18–19 2005*, hal 5

<sup>32</sup> Deputy General Manager and Head of Projects & Field Offices, Islamic Relief, UK.



Selain yang dikategorikan dalam Al Quran surat At Taubah (9)

ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Keadaan darurat seperti gempa bumi dan bencana lainnya juga menjadi tujuannya. Keyakinan Islam menjadi peran penting menjadikan manusia sadar akan skala kebutuhannya: Penerima bantuan/ amal adalah Muslim dan non Muslim (*the Recipients of Charity, Muslim and non-Muslim recipients*); Bekerja untuk semua manusia (*Working for Everyone, Muslims and non-Muslims matter*); Bekerja di wilayah non-Muslim (*Working in Non-Muslim Areas*); Pekerjaan dan bantuan Missionaris/ merujuk bahasa Arab, *da'wah*<sup>33</sup> (*Missionary Work and Aid*);

---

<sup>33</sup> Jonathan Benthall, op.cit, hal 4

Bekerja dalam kondisi politik yang tegang (*Working in a Tense Political Climate*).<sup>34</sup>

## **F. Hipotesa**

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat Rohingya yang merupakan komunitas Islam melalui Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah merupakan suatu peristiwa melewati batas negara. Ini menjadi sebuah informasi untuk lebih mendalami hal ini. Diperlukan sebuah pemikiran dalam membahas, sehingga suatu kerangka pemikiran perlu dipergunakan. Dalam hal ini kemudian diajukan hipotesa sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan misi dakwah kemanusiaan di kancah internasional, Muhammadiyah melalui berbagai macam cara sesuai dengan perangkat yang dimilikinya. Seperti keterlibatan tokohnya secara langsung dalam forum internasional maupun lembaga/ ortom di jajarannya dan juga amal usaha dibawahnya dengan menjalankan program lintas negara dan agama sesuai spesialisasi masing-masing.
2. Misi dakwah dalam kondisi masyarakat yang sedang menderita karena problem kemanusiaan, bekerjasama dengan struktur negara dalam dan luar negeri. Komunikasi bersama dan melalui mereka menjadi sistematis ragam bantuan.

---

<sup>34</sup> Hossam said, "*Faith-based Organisations as Political, Humanitarian or Religious Actors: An Islamic Perspective*", *Conflict and Humanitarian Action Faith-Based Organisations as Political, Humanitarian or Religious Actors, Switzerland, The Graduate Institute of International Studies, Geneva May 18–19 2005*, hal 42-44

3. Kerjasama lembaga non-negara, lintas agama dan geografis menjadi makna partisipasi masyarakat terhadap sesama.

## **G. Metodologi Penelitian**

Ilmu pengetahuan merupakan sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtut melalui metode ilmiah. Metode ilmiah (disebut juga metode penelitian) adalah prosedur sistematis dalam mendapatkan pengetahuan, antara lain: mengidentifikasi dan merumuskan masalah, menyusun kerangka pemikiran, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, serta menarik kesimpulan. Metodologi penelitian atau metode ilmiah merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Sehingga metodologi penelitian pantas didefinisikan sebagai suatu cara sistematis untuk penyusunan ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metodologi penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.

“Pengetahuan” adalah bahan ilmu, untuk menjawab pertanyaan “apa”. Sedangkan “ilmu pengetahuan” menjawab tentang “mengapa” tentang suatu kenyataan atau kejadian. Syarat ilmu pengetahuan adalah memiliki obyek dan metode ilmiah, atau memiliki dimensi/aspek berikut:

1. **Aspek Ontologis**, berkenaan dengan apa yang dipelajari ilmu atau berkenaan dengan obyek studi (apa yang diketahui, dipikirkan atau

- yang menjadi masalah). Contohnya: perilaku manusia saat dihadapkan pada persoalan sumber dayanya yang terbatas, sedang kebutuhan tidak terbatas.
2. **Aspek Epistemologis**, berkenaan dengan metode tertentu saat mempelajari obyek, yaitu metode keilmuan atau metode ilmiah yang didukung sarana berfikir ilmiah. Disinilah terjadi penggabungan antara pola berfikir *induktif* (hal khusus dianalisa menjadi hal umum) dengan pola berfikir *deduktif* (hal umum menjadi hal khusus). Langkah-langkah didalamnya: merumuskan masalah, menyusun kerangka berfikir, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis diakhiri menarik kesimpulan.
  3. **Aspek Aksiologis**, Berkaitan dengan manfaat ilmu yang dipandang secara *positif* dan *normatif*. Secara *positif*, untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksi berbagai fenomena sesuai dengan obyek studi yang dipelajari. Secara *normatif*, untuk mengendalikan berbagai fenomena ke arah yang diinginkan. Dalam aspek ini, erat kaitannya dengan pertimbangan nilai, etika dan moral. Saran dan rekomendasi menjadi hasil dari penelitian.

Penelitian merupakan sebuah aspek penting bagi manusia sebagai makhluk sosial terkait perkembangan jaman. Dalam filsafat ilmu yang merupakan *hakikat kebenaran* suatu ilmu, akal budi manusia merupakan

hal yang dipelajari. Salah satu cirinya, keinginan untuk mengetahui berbagai hal dan persoalan yang belum diketahui atau dipahami. Maka muncullah kata “apa” (*what*), “mengapa” (*why*) dan “bagaimana” (*how*). Untuk menjawab dengan cara diantaranya: melalui pendekatan wahyu, pendekatan akal sehat, pendekatan otoritas dan kewibawaan dan juga pendekatan ilmiah.

Menurut sifat masalah yang dihadapi dan tujuan penelitian, maka deskripsi (penelitian untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu dan frekuensi terjadinya peristiwa) digunakan sebagai metode. Dalam identifikasi, diperoleh masalah kesenjangan (*gap*) antara “apa yang seharusnya” dengan “apa yang terjadi”, “apa yang diperlukan” dengan “apa yang tersedia” atau antara “harapan” dengan “kenyataan”. Hal ini diantaranya diketahui melalui: bacaan dan diskusi. Berikutnya penyusunan kerangka pemikiran, suatu konstruksi berfikir yang bersifat logis dengan argumentasi yang konsisten dengan pengetahuan tersusun sebelumnya. Disinilah tahap penguraian teori yang menjadi titik tolak berfikir untuk menjawab masalah dengan konsep-konsep yang mengabstraksikan fenomena. Dalam hipotesis deskriptif (hipotesis yang menunjukkan pemaknaan suatu konsep dari teori) dan hipotesis verifikatif (hipotesis yang menghubungkan atau mempertautkan dua variabel atau lebih untuk diuji).

Dalam penulisan ini, disajikan komponen-komponen antara lain: Pendahuluan, Pertumbuhan Muhammadiyah Sebagai Organisasi Kemanusiaan, Problem Kemanusiaan di Rakhine (Myanmar) dan Bantuan Muhammadiyah Bersama Pemerintah RI dan Ormas Lain. Diakhiri Kesimpulan sebagai suatu penutup dalam membahas tema ini.

Dalam komponen berupa Pendahuluan, dikemukakan Latar Belakang Muhammadiyah saat pertama kali didirikan, dan menjelaskan tentang tujuan organisasi ini didirikan. Beserta aktifitas dakwah berupa layanan kemanusiaan yang sudah dilaksanakan untuk melengkapi peran otoritas negara sebagai Tujuan Riset ini dilakukan. Berlanjut pada pembentukan Rumusan Masalah yang menjadi pengikat tema ini dibahas. Dalam penulisan ini, tentunya literatur sebagai bentuk Studi Pustaka menjadi “modal” pertama yang dilanjutkan sebuah Kerangka Teoritik untuk menjadi penyangganya, sehingga “lahir” Hipotesa. Agar dipercaya tentunya Metodologi Penelitian disertakan.

Transformasi organisasi dakwah menjadi kemanusiaan dibahas sebagai komponen kedua untuk mencegah persangkaan (dalam hal ini negatif). Di dalamnya berupa Sejarah Pertumbuhan Muhammadiyah, Muhammadiyah Menjadi Ormas Kemanusiaan dan Internasionalisasi Peran Muhammadiyah. Kesemuanya menjelaskan dari awal pendirian Muhammadiyah dan aktifitasnya dari masa ke masa. Tentu ini seiring

dengan “perjalanan” waktu yang dihadapi dunia. Beriring dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Salah satunya adalah Problem Kemanusiaan di Rakhine, Myanmar yang diungkap pada bab ketiga. Sejarah Problem Kemanusiaan Rohingya yang ditulis di sini membuktikan bahwa ini bukan permasalahan baru. Adanya Kebijakan Pemerintah Myanmar Bekerjasama dengan *Kofi Annan Foundation* menjadi informasi penting. Ini bisa digunakan untuk mengetahui detail permasalahan yang terjadi di salah satu negara bagian Myanmar. Diperkuat Rekomendasi *Advisory Commission on Rakhine State* tentang Problem Rohingya.

Bab keempat yang berjudul Bantuan Muhammadiyah Bersama Pemerintah dan Ormas Lain, menjelaskan langkah yang dilakukan. Ada dua jalan yang ditempuh, yaitu Diplomasi Kemanusiaan Melalui Jalur Pemerintah dan Diplomasi Kemanusiaan Melalui Jalur Non-Pemerintah sebagai sub bagiannya. Ditambah penjelasan dalam bab ini dua wilayah yang menjadi tempat tujuan sebagian pengungsi, yaitu: Aceh dan Bangladesh. Serta aktifitas layanan yang dilakukan Muhammadiyah. Dijelaskan juga jangkauan penelitian, karena waktu yang telah disepakati tentang layanan bantuan dari Indonesia hingga Desember 2018. Tulisan ini dibuat pada saat aktifitas bantuan ini berlangsung.

Pada bab kelima, Kesimpulan. Dibahas tentang kerangka dasar dakwah layanan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat di Rakhine. Ini juga sebagai kontekstualisasi Dakwah Islam berkemajuan yang dijalankan organisasi ini. Di dalamnya beserta implikasi dan usulan yang mungkin diperlukan.